

ABSTRAK

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN

HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI

(Studi kasus diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang)

Yoshua Arizky Punuf

Nim : 21310130

Judul : Deskripsi Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Rumusan Masalah yang dikaji oleh penulis adalah 1) Mengapa terdapat Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi ? 2) Bagaimana akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi ? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah untuk mengetahui. 1) Untuk mengetahui alasan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi, 2) untuk mengetahui akibat Hukum terhadap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Variabel adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : faktor yang mempengaruhi yakni terkait Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Studi kasus diwilayah hukum pengadilan negeri kupang) Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi serta akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis penelitian yaitu alasan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena: a) Ketidakjelasan batas objek eksekusi. b) Adanya pihak lain yang menguasai lokasi objek eksekusi. c) Keamanan. d) alasan teknis. 2) Akibat Hukum bagi Putuan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan eksekusi, yaitu a) tidak tercapainya kepastian Hukum, b) Terhambatnya perlindungan Hukum bagi pihak yang menang, c) kerugian bagi kreditor atau termohon eksekusi, d) Berpotensi timbulnya perlawanan eksekusi (Derden Verzet atau Verzet), e) kemungkinan timbulnya gugatan baru, f) penurunan wibawa lembaga Pengadilan, g) penerapan prinsip Non Executable Judgment. Saran dari penulis yaitu : 1) Amar Putusan Harus Eksekutabel, Hakim tidak hanya perlu memutus perkara dengan benar, tetapi juga memastikan bahwa amar putusan bisa dilaksanakan. Putusan harus konkret, tidak multitafsir, dan memiliki deskripsi objek yang bisa dipetakan secara nyata. 2) Reformasi Hukum Acara Hukum acara perdata, saat ini dianggap kurang responsif terhadap kendala eksekusi. 3) Pemberdayaan Juru Sita, Juru sita adalah ujung tombak dalam pelaksanaan eksekusi. Mereka perlu diberikan pelatihan hukum dan teknis (misalnya soal pengukuran tanah), perlindungan hukum, serta sarana pendukung seperti pengawasan keamanan. 4) Koordinasi Antar Instansi, Pengadilan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari pihak kepolisian, Satpol PP, bahkan pemerintah daerah sangat penting. 5) Sanksi Tegas Bagi Penghambat Eksekusi, 6) Edukasi Hukum untuk Masyarakat, Banyak masyarakat tidak memahami bahwa putusan pengadilan adalah final dan wajib dipatuhi.

Kata kunci: kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan

ABSTRACT

DESCRIPTION OF FINAL AND BINDING COURT DECISIONS THAT CANNOT BE EXECUTED

(A Case Study in the Jurisdiction of the District Court of Kupang)

Yoshua arizky Punuf

Nim : 21310130

Title: Description of Court Decisions with Permanent Legal Force That Cannot Be Executed

The research questions explored by the author are: 1) Why are there court decisions with permanent legal force that cannot be executed? 2) What are the legal consequences of court decisions with permanent legal force that cannot be executed? The author's objectives are: 1) To understand the reasons why court decisions with permanent legal force cannot be executed, and 2) to understand the legal consequences of court decisions with permanent legal force that cannot be executed. The research approach used by the prospective researcher in this study is descriptive, meaning it seeks to describe and elaborate on the objects and subjects of research in a deep, broad, and detailed manner. The descriptive nature of this research aims to explain, illustrate, and elaborate on court decisions that cannot be executed and the legal consequences of such unexecutable court decisions. This research uses a normative research type. Variables are factors that constitute the core problem to be investigated. The independent variable in this study is: influencing factors related to court decisions that cannot be executed (case study in the jurisdiction of the Kupang District Court). The dependent variable is a variable that depends on the independent variable. The dependent variable in this study is: unexecutable court decisions and the legal consequences of court decisions that cannot be executed. The type and source of data used in this research is secondary data. Based on the results of the research analysis, the reasons why court decisions with permanent legal force cannot be executed are: a) Unclear boundaries of the execution object. b) The presence of other parties controlling the location of the execution object. c) Security concerns. d) Technical reasons. The legal consequences for court decisions with permanent legal force that cannot be executed are: a) Failure to achieve legal certainty. b) Hindrance to legal protection for the winning party. c) Losses for the creditor or the party subject to execution. d) Potential for execution opposition (Derden Verzet or Verzet). e) Possibility of new lawsuits arising. f) Decrease in the authority of the judicial institution. g) Application of the principle of Non-Executable Judgment. The author's suggestions are: Recommendations Enforceable Verdicts: Judges not only need to rule on cases correctly but also ensure that the verdict can be executed. Decisions must be concrete, unambiguous, and include a description of the object that can be genuinely mapped. Procedural Law Reform: Current civil procedural law is considered less responsive to execution obstacles. Revisions are needed to provisions that provide more effective execution power, including procedures for execution requests, supervision, and coercive measures against defiant parties. Empowerment of Bailiffs: Bailiffs are at the forefront of executing court decisions. They need to be provided with legal and technical training (e.g., land measurement), legal protection, and supporting facilities such as security escorts. Inter-Agency Coordination: The court cannot work alone. Support from the police, Public Order Agency (Satpol PP), and even local government is crucial. This coordination must be structured and formal, not just ad hoc. Strict Sanctions for Execution Obstruction: Parties who defy court decisions must be subjected to administrative, criminal, or civil sanctions to create a deterrent effect. This is also part of enforcing the supremacy of law. Legal Education for the Public: Therefore, legal education from judicial institutions or legal agencies is needed to increase public legal awareness.

Keywords: permanent legal force, court decisio